

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Conyers&Hills,1994) mengatakan bahwa Perencanaan bagian dari rangkaian proses yang nantinya akan berkaitan dan kemudian mencakup sebuah pilihan/keputusan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan harap untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Dari defenisi diatas kita dapat menyimpulkan perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Namun, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil di karenakan adanya pelaksanaan kegiatan yang mungkin saja masih ditemukannya hambatan-hambatan yang dapat menghambat proses pembangunan. Maka dari itu Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena pembangunan yang diharapkan hendaknya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini,banyak sekali terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu sendiri.

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 membahas tentang Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Kemudian untuk proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sendiri telah di atur dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. Disini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berdasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen resmi rencana daerah yang mempunyai peranan penting dalam menghubungkan perencanaan strategis jangka menengah

dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan masyarakat dan lembaga terkait secara berjenjang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian, semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan guna mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. Disamping itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana salah satu kedudukannya ialah sebagai peng-evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terealisasi sebagai wujud dari kinerja penyele

Maka disini Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut serta

berperan penting dalam menyusun RKPD dan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, kemudian juga bertanggung jawab dalam menganalisis dan meng-evaluasi terkait apa saja hal-hal yang perlu di pertimbangkan dalam menyusun sebuah perencanaan dengan hraoan tepat sasaran serta dapat menekan dampak negatif sekecil mungkin di masa yang akan datang.

Dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) juga memiliki fungsi dan tugas dalam penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan,yang sebagaimana tercantum dalam pasa 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Alasan penulis mengangkat topik ini adalah untuk mempelajari serta mengetahui mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara runtun dan terperinci, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang dituangkan dalam judul **“Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja**

Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Peencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Yang mana penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja hal-hal yang menjadi hambatan saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan praktik magang ini merupakan simulasi memasuki dunia kerja dengan tujuan mendapat pengalaman disuatu bidang pada sebuah perusahaan atau instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang

ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
2. Hal-hal yang menjadi hambatan saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan magang dan berbagai kegiatan yang dilakukan ditempat magang, maka penulis juga memperoleh manfaat yang tidak ditemukan secara langsung di bangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama magang, antara lain:

1. Bagi Akademis

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Bagi Praktisi

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar lebih optimal kedepannya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang. Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja, Pada Tanggal 11 Januari s/d 05 Maret 2021.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang dijadikan sarana dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode yang digunakan adalah :

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung dan melakukan wawancara dengan pegawai yang ada di Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi, dan

Pelaporan. Serta melaksanakan magang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Pencarian Data Melalui Internet Pencarian data melalui internet

Dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait, seperti mengunjungi website agar penulis dapat melengkapi data yang diperlukan guna untuk keperluan Tugas Akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data.

BAB II:LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari Pengertian Perencanaan, Manfaat Perencanaan, Pengertian Rencana Kerja, Pengertian RKPD, Teori Tahapan RKPD dan Landasan Hukum.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, visi dan misi, struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang Bappeda.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan saat proses penyusunan RKPD.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan

